

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Tri Widodo, 2006). Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Menurut Todaro (2006) pembangunan adalah merupakan suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama satu periode tertentu tidak lepas dari perkembangan masing-masing sektor atau subsektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu

daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih meninggalkan permasalahan yang harus dihadapi didalam pembangunan suatu daerah.

Salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan yaitu terjadinya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah dan antar kawasan yang menyebabkan terjadinya laju pertumbuhan antar daerah dan antar kawasan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah (Mudrajat Kuncoro,2003). Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Kebijakan pembangunan daerah di Indonesia sendiri didasarkan atas karakteristik sosial ekonomi dari beberapa daerah. Hal ini dikarenakan dari beberapa daerah mempunyai perbedaan sosial ekonomi yang berimplikasi pada cakupan campur tangan pemerintah untuk setiap daerah yang berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, jika hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara.

Provinsi Jawa Timur terdiri atas 35 kabupaten/kota yang memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, sumber daya alam dan kemajuan teknologi yang penyebarannya berbeda di setiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki

seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*).

Penerapan otonomi daerah mulai tahun 2004 sampai sekarang pada dasarnya bertujuan untuk mengefisiensikan segala kebijakan yang berkaitan tentang urusan daerah, dengan harapan agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masing-masing daerah sehingga mampu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan penerapan otonomi daerah pertumbuhan ekonomi lebih baik dari masa sebelumnya.

Pada era otonomi daerah kondisi dan potensi ekonomi daerah merupakan modal dasar dan faktor dominan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur, yang dapat didayagunakan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan dari pemerintah, terutama dalam mengambil kebijakan yang mengarah pada perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 tahun 1992 dengan pembaharuan Perda Provinsi Jawa Timur No. 21 tahun 2003 tentang “Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jawa Timur”, pemerintah provinsi membentuk kawasan kerjasama antar daerah yang dipandang dari potensi dan struktur ekonomi kewilayahan dapat dimanfaatkan bagi upaya pemerataan pembangunan dalam suatu kawasan.

Berdasarkan Perda itu, Provinsi Jawa Timur menetapkan kawasan kerjasama yang di kelompokkan dalam 9 satuan wilayah pembangunan (SWP). Salah satu wilayah pembangunan yang ada di Jawa Timur adalah SWP I

Gerbangkertosusila yang di dalamnya terdiri dari 7 kabupaten/kota di antaranya : Kabupaten. Gresik, Kabupaten. Bangkalan, Kabupaten. Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten. Sidoarjo, Kota. Mojokerto dan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya kawasan inilah yang nantinya akan diamati dalam penelitian ini.

Kawasan kerjasama ini dibentuk sebagai salah satu strategi dasar didalam melakukan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah. Diharapkan dengan adanya pembagian ini, masing-masing daerah dalam suatu kawasan kerjasama akan saling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan. Dengan kerjasama antar daerah, kekuatan masing-masing daerah yang bekerjasama dapat diselaraskan untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan Gerbangkertasusila, merupakan salah satu kota dengan laju pertumbuhan tinggi di Jawa Timur. Disamping itu, Kota Surabaya mempunyai jarak yang relatif sama terhadap daerah pendukungnya. Penetapan Kota Surabaya sebagaai pusat pertumbuhan kawasan Gerbangkertasusila diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* bagi kabupaten pendukungnya di kawasan Gerbangkertasusila.

Pertumbuhan yang tinggi di Gerbangkertasusila pada era otonomi daerah masih meninggalkan masalah. Salah satu masalahnya adalah kesenjangan, dilihat dari perkembangan dan perbandingan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan Kabupaten/Kota di Gerbangkertasusila antara tahun (2005) sampai dengan (2010) diduga masih mengalami kesenjangan pembangunan (tabel 1.1).

Tabel 1.1
PDRB Menurut Kabupaten/Kota Wilayah Gerbangkertasusila Tahun 2005-2010 ADHK 2000 (Juta Rupiah)

KAB/KOTA	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kab. Bangkalan	2799870.42	2937991.74	3088165.76	3236148.77	3374231.84	3557730.72
Kab. Gresik	12479322.00	13472991.76	14396218.71	15266201.74	16122923.21	17239939.76
Kab. Lamongan	4050787.73	4219766.70	4472100.32	4750502.54	5025860.78	5372414.75
Kab. Mojokerto	5070433.17	5378257.85	5700083.37	6028163.32	6329991.22	6760777.38
Kab. Sidoarjo	22176950.54	23955410.98	25293260.66	26452111.12	27650760.14	29361133.04
Kot. Mojokerto	1019955.81	1070490.43	1135995.89	1202677.14	1264135.65	1347065.73
Kot. Surabaya	65706437.19	69932850.59	74674946.22	79532169.69	83621395.10	89539452.72

Sumber : PDRB JATIM menurut kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2005-2010.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Gerbangkertasusila, hanya 3 kabupaten/Kota PDRB perkapitanya berada di atas rata-rata PDRB Gerbangkertasusila yaitu kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo dan kota Surabaya, dari data tersebut mengidentifikasikan bahwa sebagian kecil (dua Kabupaten dan satu kota) di Gerbangkertasusila yang pelaksanaan pembangunan berhasil melampaui rata-rata Gerbangkertasusila. Sedangkan 3 Kabupaten masih berada di bawah rata-rata PDRB Gerbangkertasusila. dan ini mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan antar daerah. Kenaikan dan penurunan pertumbuhan di Gerbangkertasusila selama 6 tahun terakhir dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Samuelson dan Nourdhous (1997) menyebutkan bahwa salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk (angkatan kerja). Pertama pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) disertai dengan lapangan pekerjaan akan meningkatkan output perekonomian. Pertumbuhan penduduk disini juga mencakup produktifitas

tenaga kerja itu sendiri. Kedua, akumulasi modal. Pemilik modal akan memiliki kesempatan untuk melakukan investasi kembali sehingga akan meningkatkan output perekonomian.

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Gambaran mengenai jumlah orang bekerja di Gerbangkertasusila dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Keatas Di Gerbangkertasusila
Tahun 2005-2010

Kabupaten/ Kota	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kab.bangkalan	453393	467954	436230	448771	473812	407091
Kab.Gresik	509035	546661	580863	592346	593150	541720
Kab.Lamongan	673912	679677	649878	657976	652322	575822
Kab.Mojokerto	500795	526852	542104	543473	547465	518877
Kab.Sidoarjo	917138	861788	910851	924661	916206	917622
Kot.Mojokerto	58650	59341	58167	61051	61666	56836
Kot.Surabaya	1418550	1330417	1355335	1418667	1372419	1245542

Sumber : BPS Jawa Timur, Sakernas dan Susenas tahun 2005-2010

Jika dilihat dari tabel perkembangan pertumbuhan pencari kerja di Gerbangkertasusila tahun 2007 sampai 2008 cenderung mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa angkatan pengangguran di Gerbangkertasusila juga mengalami kenaikan. Hal tersebut mungkin juga dapat menghambat proses pembangunan dan pertumbuhan di gerbangkertasusila.

Salah satu indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Penduduk yang berpendidikan minimal tamatan perguruan tinggi (S1) diasumsikan mempunyai keterampilan dan pengetahuan tinggi, sehingga dapat menyerap teknologi modern dan meningkatkan kapasitas produksi. Dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan penduduk dengan pendidikan tamatan Perguruan Tinggi (S1) di Gerbangkertasusila untuk tahun 2005 sampai dengan 2010 sebagaimana terdapat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Pendidikan Tamatan Perguruan Tinggi (S1) Di
Gerbangkertasusila Tahun 2005-2010

KABUPATEN/KOTA	2005	2006	2007	2008	2009	2010
kabupaten bangkalan	18,27	8,73	17,96	11,4	41,09	17,21
kabupaten gresik	53,76	52,78	60,2	46,57	58,08	53,32
kabupaten lamongan	25,34	28,17	37,4	29,73	49,9	37,47
Kabupaten Mojokerto	27,31	25,93	37,68	21,06	45,12	26,74
kabupaten sidoarjo	92,57	103,77	133,37	91,44	171,71	140,45
kota Mojokerto	7,53	8,48	10,64	8,5	9,67	11,64
kota Surabaya	268,33	265,93	273,72	232,81	286,7	260,91

Sumber : BPS Jawa Timur, Sakernas dan Susenas tahun 2005-2010

Dilihat dari Tabel 1.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata per tahunnya tamatan Perguruan Tinggi. Bila dibandingkan dengan penyerapan

tenaga kerja nilai pertumbuhan penduduk tamatan Perguruan Tinggi lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa belum terserapnya secara maksimal penyerapan angkatan kerja penduduk tamatan Perguruan Tinggi di Gerbangkertasusila. Sehingga tenaga kerja terdidik (pengangguran terdidik) yang belum terserap di pasar tenaga kerja di Gerbangkertasusila. Permasalahan ini akan berakibat pada lambatnya proses pertumbuhan dan pembangunan di Gerbangkertasusila.

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam APBD. Kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tercermin dari total belanja pemerintah yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan (Marganda dan Sirojuuzilam,2009).

Dari uraian mengenai kondisi perekonomian yang ditinjau dari laju pertumbuhan PDRB serta kondisi ketenagakerjaan, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah di kawasan Gerbangkertasusila menunjukkan pertumbuhan kinerja ekonomi yang berfluktuasi dan masih terdapatnya ketimpangan ekonomi antar daerah di kawasan Gerbangkertasusila. majunya perekonomian suatu daerah tidak lepas dari potensi yang ada di masing-masing daerah tersebut, baik dari sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia serta sistem perekonomian yang baik. Dari latar belakang tersebut, maka menarik untuk mengkaji pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kinerja perekonomian di Gerbangkertasusila.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila tahun 2005-2010?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila tahun 2005-2010?
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila tahun 2005-2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis besarnya pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila tahun 2005-2010.
2. Menganalisis besarnya pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila tahun 2005-2010.
3. Menganalisis besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertasusila tahun 2005-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi di kawasan Gerbangkertasusila
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai kinerja perekonomian di Gerbangkertasusila, dimana secara teori pertumbuhan ekonomi (PDRB) dapat dipengaruhi faktor tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah dan beserta masalahnya. Bab ini juga menjelaskan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu teori-teori yang relevan dan mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain teori pembangunan (teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo klasik, teori wilayah, teori pertumbuhan pertumbuhan baru). Dalam bab ini juga tercantumkan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional. Pada study ini digunakan dengan menggunakan data sekunder dengan jenis data adalah panel data. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis *Fix Effect Model (FEM)*..

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada permulaan bab ini akan digambarkan secara singkat keadaan perkembangan tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah. Bab ini juga memuat hasil dan pembahasan analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar penelitian.